



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI HARTI WIDYASTUTI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **61727**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.632.700.000

1. Tanah Seluas 960 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 192.000.000
2. Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 857 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 171.400.000
4. Tanah Seluas 1625 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 325.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/340 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.492.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 231.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 418.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 218.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 482.745.445**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.533.445.445



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.533.445.445

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.